

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara (disingkat Muratara) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.⁵³ Kabupaten ini dibentuk sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Muratara adalah bagian dari Kabupaten Musi Rawas yang mencakup wilayah cukup luas. Pemekaran ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Diresmikan pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Daerah yang memiliki motto Berselang Serundingan ini juga menjadi simbol semangat masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih cerah, mandiri dan sejahtera.

Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Muratara memiliki ibu kota di Rupit, dan wilayah administratifnya mencakup:
Kecamatan Rupit

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas_Utara

Kecamatan Rawas Ulu

Kecamatan Karang Dapo

Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Ulu Rawas

Kecamatan Nibung

Kecamatan Rawas Ilir

Dengan luas wilayah yang luas tersebut muratara memiliki sungai sungai yang membelah wilayah ini,seperti sungai rawas dan sungai rupit.

2. Demografi Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki Luas 600.865,51 ha dan memiliki jumlah seluruh penduduk mencapai 201,49 Ribu jiwa. Setelah memisahkan diri dari kabupaten musu rawas,kabupaten ini terdiri dari 7 kecamatan,82 desa dan 7 kelurahan.

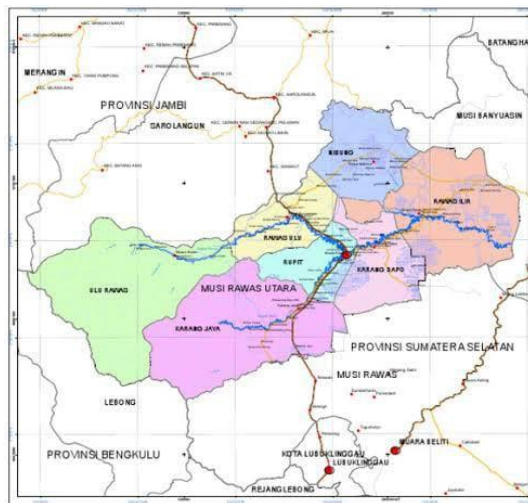
Di kabupaten Musi Rawas Utara memiliki angka rata-rata penduduk 23.28ribu jiwa yang memiliki pendidikan di tingkat SMA.Bahasa yang sering digunakan di kabupaten ini adalah bahasa bahasa melayu rawas dan melayu musu.

Kepadatan penduduk di Musi Rawas Utara tergolong rendah, dengan rata-rata sekitar 34 jiwa per km². Namun, sebaran penduduk tidak merata. Daerah-daerah seperti Kecamatan Rupit (yang merupakan pusat pemerintahan) memiliki kepadatan yang lebih tinggi, sedangkan daerah-

daerah seperti Kecamatan Karang Jaya atau Rawas Ilir cenderung lebih jarang penduduk.

3. Letak Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara

Peta Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara



Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Selatan, lokasinya yang strategis membuat kabupaten ini berada di pertemuan jalur penghubung antar provinsi, terutama provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.

Secara administratif, muratara berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara: Provinsi Jambi (Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo)

Sebelah Timur: Kabupaten Musi Banyuasin

Sebelah Selatan: Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat: Provinsi Bengkulu (Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)

Letak geografis Kabupaten Muratara menjadikannya sebagai jalur strategis lintas provinsi. Jalan utama yang melintasi kabupaten ini menghubungkan wilayah Lubuklinggau (pusat kota Musi Rawas dan gerbang Sumatera Selatan bagian barat) dengan Jambi dan Bengkulu. Posisi ini mendukung perkembangan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk.

Selain itu, Muratara memiliki letak topografis yang bervariasi, dengan bagian timur berupa dataran rendah yang subur, dan bagian barat berupa perbukitan serta pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi geografis ini juga berpengaruh terhadap pola pemukiman dan aktivitas perekonomian masyarakat, di mana wilayah dataran rendah lebih padat penduduk dan aktif dalam bidang pertanian serta perkebunan, sedangkan wilayah perbukitan menjadi pusat hasil hutan, pertambangan, dan potensi wisata alam.

Dengan lokasi strategis dan kondisi geografis yang beragam, Kabupaten Muratara memiliki potensi besar untuk pengembangan infrastruktur transportasi, perdagangan lintas provinsi, pertanian, pariwisata, dan konservasi lingkungan.

Namun Demikian,Kabupaten musi rawas utara juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan.Oleh karena itu,penelitian bersifat aplikatif dan solutif sangat di butuhkan guna membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat dan berbasis data.

B. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

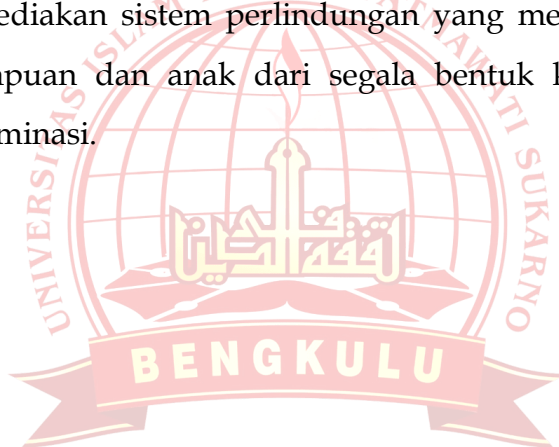
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabuapten Musi Rawas Utara didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 3 Tahun 2016. Dinas PMD-P3A ini beralamat kan jalan Lintas Sumatera,Kelurahan Muara Rupit,Kabupaten Musi Rawas Utara.Dinas ini memeiliki fungsi Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selain dari pada itu dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabuapten Musi Rawas Utara melakukan perumusan kebijakan teknis seperti,pembangunan dan pengelolaan pemerintah desa,melakukan pemberdayaan kemasyarkatan desa dan melukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat desa serta menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak.

Secara garis besar, DPMD-P3A memiliki tiga mandat utama:

- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa.
- Memberdayakan perempuan sebagai subjek pembangunan.
- Menyediakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.



C. Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera serta perempuan dan anak yang terlindungi dalam lingkungan yang berkeadilan dan berdaya”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
2. Mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan
3. Membangun sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat
4. Menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui sinergi lintas sektor dan Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap layanan sosial, hukum dan kesehatan.

**D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara**

